



LURAH NGESTIHARJO
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN NGESTIHARJO
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH NGESTIHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun tentang Desa 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 6 tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 6);
24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
25. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134);
26. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul tahun 2020 Nomor 86).
27. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
28. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Bagi Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 134);
29. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
30. Peraturan Bupati Bantul Nomor 180 Tahun 2021 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 180);
31. Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 13);

32. Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2022 tentang Bantuan Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Pada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 14) yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Pada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 31);
33. Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 20);
34. Peraturan Bupati Bantul Nomor 22 Tahun 2022 tentang Dana Insentif Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Dana Insentif Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 39);
35. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
36. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
37. Peraturan Bupati Bantul Nomor 102 tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cash Management System Dalam Transaksi Non Tunai pada Belanja Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 102);
38. Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 103);

39. Peraturan Desa Ngestiharjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Ngestiharjo Tahun 2019 Nomor 4);
40. Peraturan Kalurahan Desa Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Ngestiharjo (Lembaran Desa Ngestiharjo Tahun 2020 Nomor 10);
41. Peraturan Kalurahan Ngestiharjo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Ngestiharjo Tahun 2020 Nomor 11);
42. Peraturan Kalurahan Ngestiharjo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Ngestiharjo (Lembaran Kalurahan Ngestiharjo Tahun 2020 Nomor 12);
43. Peraturan Kalurahan Ngestiharjo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Ngestiharjo Tahun 2021 Nomor 5);
44. Peraturan Kalurahan Ngestiharjo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Ngestiharjo Tahun 2022 Nomor 4);
45. Peraturan Kalurahan Ngestiharjo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Ngestiharjo Tahun 2022 Nomor 5);

DENGAN KESEPAKATAN BESAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NGESTIHARJO
dan
LURAH NGESTIHARJO

Memutuskan :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan tahun anggaran 2023 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan

a. Pendapatan Asli Kalurahan	Rp	47.338.500,00
b. Pendapatan Transfer	Rp	5.831.575.894,00
c. Pendapatan Lain-Lain	Rp	13.252.595,00
Jumlah Pendapatan	Rp	5.892.166.989,00

2. Belanja Kalurahan

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	Rp	2.707.615.608,40
b. Bidang Pembangunan	Rp	2.147.569.500,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	642.711.602,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	543.965.000,00
e. Bidang Penanggulangan Kebencanaan	Rp	453.950.000,00
Jumlah Belanja Kalurahan	Rp	6.495.811.710,40
Surplus/(defisit)	Rp	(603.644.721,40)

3. Pembiayaan Kalurahan

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	613.644.721,40
b. Pengeluaran pembiayaan	Rp	10.000.000,00
Selisih pembiayaan (a – b)	Rp	603.644.721,40
Sisa lebih/kurang perhitungan anggaran 2022		0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dalam Pasal 2 memuat APB Kalurahan;

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang hal luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan tentang

Penjabaran APB Kalurahan dan memberitahukannya kepada Badan Permasyarakatan Kalurahan.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Kalurahan Ngestiharjo.

Ditetapkan di Ngestiharjo
Pada tanggal 30 Desember 2022
LURAH NGESTIHARJO,

ttd

FATHONI ARIBOWO

Diundangkan di Ngestiharjo
Pada tanggal 30 Desember 2022
CARIK NGESTIHARJO,

ttd

DEDY RIDWANMAS S



LEMBARAN KALURAHAN NGESTIHARJO TAHUN 2022 NOMOR 6
NOREG PERATURAN KALURAHAN NGESTIHARJO KAPANEWON KASIHAN
KABUPATEN BANTUL (29/NGESTIHARJO/2022)

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA NGESTIHARJO
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	47.338.500,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	5.831.575.894,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	13.252.595,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	5.892.166.989,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	1.446.878.238,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.383.169.926,40	
5.3.	Belanja Modal	211.813.546,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	453.950.000,00	
	JUMLAH BELANJA	6.495.811.710,40	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(603.644.721,40)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	613.644.721,40	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	613.644.721,40	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	10.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	603.644.721,40	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Bantul, 30 December 2022

LURAH

FATHONI ARIBOWO

Salinan Sesuai dengan aslinya,
 An. Carik Ngestiharjo
 Kepala Urusan Pangripta,

 YULI TRIWASIH



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA NGESTIHARJO
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	47.338.500,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	5.831.575.894,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	13.252.595,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	5.892.166.989,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>2.707.615.608,40</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	2.026.491.942,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	67.900.752,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	67.900.752,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	763.170.804,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	763.170.804,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	19.500.000,00	PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	19.500.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	491.081.204,00	ADD, DDS, DLL, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	487.637.658,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	3.443.546,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	105.840.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	105.840.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	15.432.500,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.432.500,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	68.100.000,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	68.100.000,00	
1.1.90		Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK	1.500.000,00	PBH
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Bamuskal	100.185.982,00	PBH
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	100.185.982,00	
1.1.93		Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah,Pamong Kalurahan dan Bamuskal	77.483.100,00	PBH
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	77.483.100,00	
1.1.97		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan	55.515.600,00	ADD
1.1.97	5.1.	Belanja Pegawai	55.515.600,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.98		Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorer	250.782.000,00	ADD
1.1.98	5.1.	Belanja Pegawai	250.782.000,00	
1.1.99		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	10.000.000,00	PAD
1.1.99	5.1.	Belanja Pegawai	5.000.000,00	
1.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	147.600.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	78.500.000,00	ADD, PAD
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	68.000.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	34.100.000,00	ADD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.100.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	35.000.000,00	ADD
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	37.407.088,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	1.010.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.010.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	4.058.000,00	PAD
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.058.000,00	
1.3.04		Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil	4.204.088,00	PBH
1.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.204.088,00	
1.3.94		Penyusunan / Pendataan / Pemutakhiran Data Monografi Kalurahan	1.010.000,00	DDS
1.3.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.010.000,00	
1.3.99		Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan	27.125.000,00	DDS
1.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.125.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	359.384.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	68.335.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	68.335.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	20.592.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.592.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	11.805.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.805.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	38.729.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.729.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	44.145.000,00	ADD, PBH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.145.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	11.478.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.478.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	6.300.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	148.000.000,00	PAD, PBH
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	148.000.000,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm L omdes	10.000.000,00	DDS
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	136.732.578,40	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	97.882.578,40	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	97.882.578,40	
1.5.91		Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan	38.850.000,00	PAD
1.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.850.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>2.147.569.500,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	208.419.200,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	178.999.200,00	BMP, DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	178.999.200,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	29.420.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.420.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	746.785.400,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	26.675.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.675.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	111.400.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	111.400.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll)	112.075.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	103.075.000,00	
2.2.03	5.3.	Belanja Modal	9.000.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	46.985.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.985.000,00	
2.2.07		Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	7.925.000,00	DDS
2.2.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.925.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	258.560.400,00	BMP
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	258.560.400,00	
2.2.90		Fasilitasi Penyelenggaraan Pos Binaan Terpadu (POSBINDU)	14.435.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.435.000,00	
2.2.92		Pembinaan Kampung KB	35.395.000,00	DDS
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.395.000,00	
2.2.94		Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting	101.155.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	101.155.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.95		Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis / Resiko Tinggi Dan Nifas	11.400.000,00	DDS
2.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.400.000,00	
2.2.96		Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,DII)	20.780.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.780.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	548.429.500,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	145.000.000,00	PBK
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	145.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	275.000.000,00	PBK, PBP
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	275.000.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	120.000.000,00	PBK, PMK
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	
2.3.92		Pembangunan Area Bermain Anak Untuk Mendukung Kalurahan Layak Anak	8.429.500,00	DDS
2.3.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.429.500,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	91.190.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	74.270.000,00	SDD
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.170.000,00	
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	72.100.000,00	
2.4.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **)	16.920.000,00	DDS
2.4.10	5.3.	Belanja Modal	16.920.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	292.745.400,00	
2.5.91		Pelatihan Pengelolaan / Pengelolaan Sampah	292.745.400,00	BMP, DDS
2.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	292.745.400,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	260.000.000,00	
2.6.06		Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan	260.000.000,00	PBK
2.6.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	260.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>642.711.602,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	117.402.500,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	52.500.000,00	DDS
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.500.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	8.485.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.485.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	18.130.000,00	DDS, PBH
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.130.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	13.735.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.735.000,00	
3.1.92		Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)	11.290.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.290.000,00	
3.1.95		Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap NAPZA tingkat Kalurahan	13.262.500,00	DDS
3.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.262.500,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	244.297.552,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	144.077.552,00	DLL, PAD, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	144.077.552,00	
3.2.05		Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **)	16.500.000,00	PBH
3.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.500.000,00	
3.2.90		Pembinaan Bidang Keagamaan	83.720.000,00	ADD, PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	83.720.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	163.236.550,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	105.011.550,00	DDS, SDD
3.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.661.550,00	
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	42.350.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	58.225.000,00	DDS, SDD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.225.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	117.775.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	8.850.000,00	DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.850.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	70.925.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.925.000,00	
3.4.94		Pelatihan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kalurahan	8.000.000,00	DDS
3.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
3.4.99		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	30.000.000,00	PAD
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>543.965.000,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	56.995.000,00	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	28.000.000,00	SDD
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	
4.1.06		Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan **)	28.995.000,00	DDS
4.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.995.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	382.625.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	5.975.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.975.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	48.385.000,00	DDS, SDD
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.385.000,00	
4.2.90		Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan	135.950.000,00	DDS
4.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	135.950.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.91		Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian/Peternakan/ Pasca Panen	147.595.000,00	DDS
4.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	147.595.000,00	
4.2.93		Pelatihan/Pengembangan Produksi/Pemasaran Bibit Unggul	20.820.000,00	DDS
4.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.820.000,00	
4.2.95		Angkat Walet	23.900.000,00	DDS
4.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.900.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	48.900.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	12.000.000,00	ADD
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	19.800.000,00	ADD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.800.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	8.100.000,00	ADD
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.100.000,00	
4.3.90		Peningkatan Kapasitas Staf/Tenaga Honorer Kalurahan/Kader Pembangunan Manusia/Kader lainnya	9.000.000,00	ADD
4.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	55.445.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	55.445.000,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.445.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>453.950.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	43.550.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	43.550.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	43.550.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	410.400.000,00	
5.3.01		Bantuan Langsung Tunai (BLT)	410.400.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	410.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	6.495.811.710,40	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(603.644.721,40)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	613.644.721,40	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	603.644.721,40	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Salinan Sesuai dengan aslinya,
An. Carik Ngestiharjo
Kepala Urusan Pangripta,

YULI TRUWASIH

Bantul, 30 December 2022

LURAH

FATHONI ARIBOWO